

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TANGGAL 17 APRIL 2024
TENTANG
DEALER UTAMA

FORMAT PERMOHONAN UNTUK MENJADI
DEALER UTAMA (*PRIMARY DEALER*)

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN UNTUK MENJADI DEALER UTAMA
(*PRIMARY DEALER*).....2

B. CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DIKENAI SANKSI OLEH
OTORITAS TERKAIT.....3

C. CONTOH SURAT PERNYATAAN/BUKTI TELAH MENJADI ANGGOTA *SELF
REGULATORY ORGANIZATION* PASAR UANG DAN PASAR VALUTA
ASING.....4

D. *COMPLIANCE CHECKLIST* DOKUMEN PENDUKUNG PERMOHONAN
UNTUK MENJADI DEALER UTAMA (*PRIMARY DEALER*)5

A. **CONTOH SURAT PERMOHONAN UNTUK MENJADI DEALER UTAMA (PRIMARY DEALER)**

[Lokasi penandatanganan dokumen], [Tanggal dokumen]

No. :
Lamp. :

Kepada Yth.
Bank Indonesia
c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
Jl. MH Thamrin No.2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan untuk Menjadi Dealer Utama (Primary Dealer)

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk menjadi Dealer Utama (*primary dealer*) dengan data sebagai berikut:

Informasi Pemohon

Nama Institusi :
Alamat Kantor Pusat :
.....
.....
No. Telp :

Informasi Person in Charge (PIC)

Nama Lengkap :
Jabatan :
Alamat :
Alamat Email :
No. Telp/HP :

Terlampir kami sampaikan dokumen persyaratan permohonan dimaksud.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
[Nama badan hukum]

[Nama direktur yang mewakili
instansi
[Jabatan]

B. CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DIKENAI SANKSI OLEH OTORITAS TERKAIT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan :
Alamat :
Alamat Email :
No. Telp/HP :

berwenang untuk bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili (PT Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT.....)¹ berdasarkan ...² dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT.....)³, dengan ini menyatakan bahwa kami tidak sedang dikenakan sanksi oleh otoritas terkait.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui ternyata pernyataan tersebut tidak benar maka (nama badan hukum) bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama badan hukum]

[Tanda tangan dan stempel badan hukum]

Meterai,
Rp10.000

[Nama direktur yang mewakili
instansi]
[Jabatan]

¹ Pilih salah satu
² Diisi berdasarkan bentuk badan hukum calon Peserta sebagai berikut:
(anggaran dasar nomor..... yang dimuat dalam Akta tanggal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ak ta tanggal).
Khusus untuk BPD yang tidak berbadan hukum PT diisi sebagai berikut:
(Surat Keputusan Gubernur nomortanggal dan berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Nomor tanggal.....yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor tanggal yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.....).
³ Pilih salah satu

C. CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MENJADI ANGGOTA SELF REGULATORY ORGANIZATION PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan :
Alamat :
Alamat Email :
No. Telp/HP :

berwenang untuk bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili (PT Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT.....)⁴ berdasarkan ...⁵ dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT.....)⁶, dengan ini menyatakan bahwa kami telah terdaftar sebagai anggota *self regulatory organization*, yaitu ...⁷

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui ternyata pernyataan tersebut tidak benar maka (nama badan hukum) bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama badan hukum]

[Tanda tangan dan stempel badan hukum]

Meterai,
Rp10.000

[Nama direktur yang mewakili
instansi]
[Jabatan]

⁴ Pilih salah satu
⁵ Diisi berdasarkan bentuk badan hukum calon Peserta sebagai berikut:
(anggaran dasar nomor..... yang dimuat dalam Akta tanggal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ak ta tanggal).
Khusus untuk BPD yang tidak berbadan hukum PT diisi sebagai berikut:
(Surat Keputusan Gubernur nomortanggal dan berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Nomor tanggal.....yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor tanggal yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.....).
⁶ Pilih salah satu
⁷ Diisi dengan nama *Self Regulatory Organization*

**D. COMPLIANCE CHECKLIST DOKUMEN PENDUKUNG PERMOHONAN
UNTUK MENJADI DEALER UTAMA (PRIMARY DEALER)**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Surat pernyataan/bukti telah menjadi anggota <i>Self Regulatory Organization</i> Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.		
2.	Surat keterangan sedang tidak dikenai sanksi oleh otoritas terkait.		

Demikian *checklist* ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Bank Indonesia.

Hormat kami,

[Nama badan hukum]

[Nama direktur yang mewakili
instansi
[Jabatan]

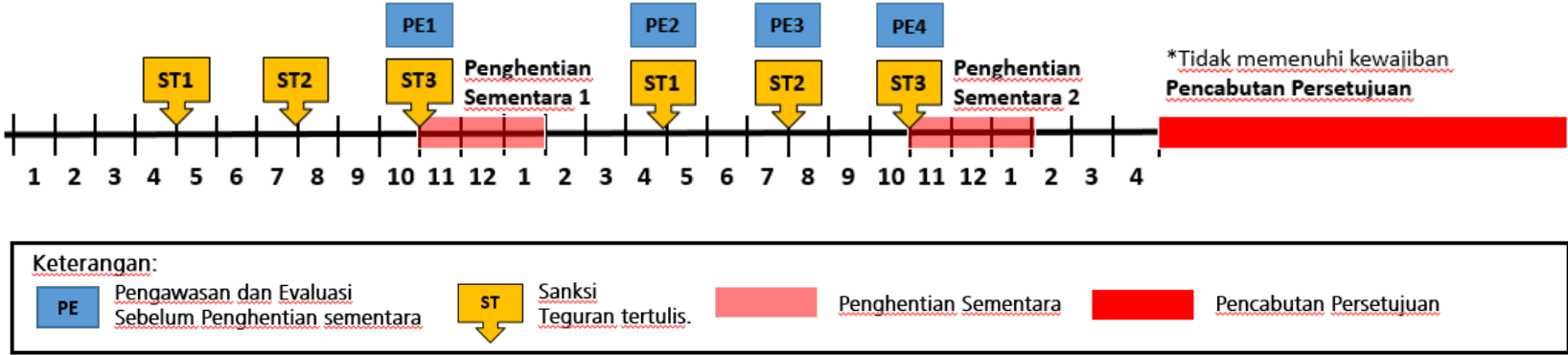
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TANGGAL 17 APRIL 2024
TENTANG
DEALER UTAMA

CONTOH PENGENAAN SANKSI ATAS HASIL PENGAWASAN & EVALUASI PEMENUHAN KEWAJIBAN DEALER UTAMA (*PRIMARY DEALER*)



- Keterangan:
- Dalam hal dealer utama (*primary dealer*) telah memperoleh teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dealer utama (*primary dealer*) selama 3 (tiga) bulan.
 - Dalam hal pada periode pengawasan dan evaluasi sebelumnya dealer utama (*primary dealer*) telah dikenai sanksi penghentian sementara dealer utama (*primary dealer*) sebanyak 2 (dua) kali dalam 4 (empat) periode pengawasan dan evaluasi berturut-turut dan tetap tidak memenuhi kewajiban pada periode pengawasan dan evaluasi setelah penghentian sementara, Bank Indonesia mencabut persetujuan sebagai dealer utama (*primary dealer*).

3. Dalam hal dealer utama (*primary dealer*) telah memenuhi kewajiban setelah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau penghentian sementara dealer utama (*primary dealer*), perhitungan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dimulai kembali dari awal.

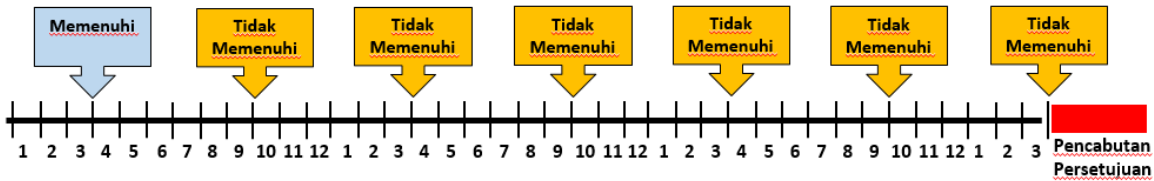
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

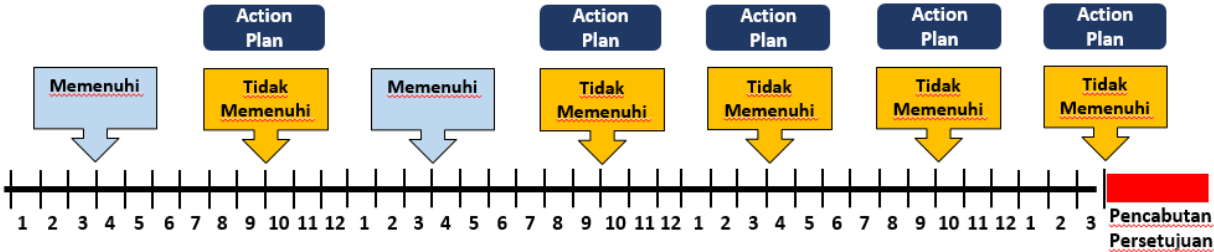
CONTOH PENGENAAN PENCABUTAN PERSETUJUAN SEBAGAI DEALER UTAMA (*PRIMARY DEALER*) ATAS HASIL PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA DEALER UTAMA (*PRIMARY DEALER*)

A. Pengenaan Pencabutan Persetujuan sebagai Dealer Utama (*Primary Dealer*) atas Hasil Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Terhadap Kriteria Umum



Keterangan:
Tidak Memenuhi Dealer Utama tidak memenuhi Kriteria berdasarkan Pengawasan & Evaluasi Kinerja Pencabutan Persetujuan

B. Pengenaan Pencabutan Persetujuan sebagai Dealer Utama (*Primary Dealer*) atas Hasil Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Terhadap Kriteria Khusus



<u>Keterangan:</u>			
	Dealer Utama tidak memenuhi Kriteria berdasarkan Pengawasan & Evaluasi Kinerja		Pencabutan Persetujuan  Dealer Utama harus menyampaikan Rencana Tindak (<i>action plan</i>) kepada BI

Keterangan:

1. Dalam hal atas hasil pengawasan dan evaluasi kinerja dealer utama (*primary dealer*) tidak memenuhi kriteria umum sebanyak 6 (enam) kali periode pengawasan dan evaluasi berturut-turut, maka Bank Indonesia mencabut persetujuan sebagai dealer utama (*primary dealer*).
2. Dalam hal atas hasil pengawasan dan evaluasi kinerja dealer utama (*primary dealer*) tidak memenuhi kriteria khusus sebanyak 4 (empat) kali periode pengawasan dan evaluasi berturut-turut, maka Bank Indonesia mencabut persetujuan sebagai dealer utama (*primary dealer*).
3. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi kinerja dealer utama (*primary dealer*) tidak memenuhi kriteria khusus, maka dealer utama (*primary dealer*) harus menyampaikan *action plan* berupa rencana tindak kepada Bank Indonesia.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TANGGAL 17 APRIL 2024
TENTANG
DEALER UTAMA

**CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN PERSETUJUAN SEBAGAI
DEALER UTAMA (*PRIMARY DEALER*)**

[Lokasi penandatanganan dokumen], [Tanggal dokumen]

No. :
Lamp. :

Kepada Yth.
Bank Indonesia
c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
Jl. MH Thamrin No.2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Pencabutan Persetujuan Sebagai Dealer Utama
(*Primary Dealer*)

Bersama ini kami mengajukan permohonan pencabutan persetujuan sebagai dealer utama (*primary dealer*) sebagai berikut:

Informasi Pemohon

Nama Instansi :
Alamat Kantor Pusat :
.....
.....

No. Telp :
dengan pertimbangan...*)

Untuk melengkapi permohonan kami, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung**) permohonan.
Demikian permohonan kami.

Hormat kami,
[Nama badan hukum]

[Nama direktur yang mewakili
instansi
Jabatan]

*) Diisi dengan alasan permohonan
**) Ditulis apabila terdapat dokumen pendukung

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI